PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA 2019

JL. MT. HARYONO KM. 3 SINTANG KALIMANTAN BARAT
TELEPON 0565-2024722
KODE POS 78614

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021.

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2019 terdapat 6 (enam) kegiatan baru yang merupakan Program dan Kegiatan Prioritas 2, semula tidak tertampung dalam anggaran murni APBD Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari bahwa dengan keterbatasan sarana dan prasana serta sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan organisasi, namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan perencanaan ini.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Sintang, September 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL

Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... Hal

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 Dan Capaian Renstra SKPD 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 .....
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 21
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019..... 23

BAB IV PENUTUP 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendukung penyusunan rencana tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang diawali dengan penyusunan Rancangan Renja sebagai bahan awal penyusunan RKPD.

Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokoknya membantu Bupati Sintang dalam melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sendirinya wajib menyusun Renja tahun 2019. Renja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, juga akan melahirkan skala prioritas program/kegiatan dari urusan pemerintahan yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan. Pada saat yang sama, Renja ini juga merupakan penjabaran operasional dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Mengingat pentingnya dokumen Renja tersebut, maka untuk acuan dalam mengimplementasi program dan kegiatan, Renja ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Rencana Kerja. Dokumen Rencana Kerja memuat rencana program prioritas dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD yang memuat program prioritas pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Keberadaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu rencana dengan rencana lainnya. Adapun hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang yaitu Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan penjabaran di bidang Sosial lebih teknis dan operasional.
2. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2021, merupakan pelaksanaan Renstra tahun ketiga.
3. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan dokumen perencanaan teknis yang bersifat sektoral adalah bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang periode 2017-2021 merupakan acuan umum terhadap dokumen perencanaan teknis yang bersifat sektoral tersebut.
4. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah bahwa Renja Dinas Sosial merupakan

salah satu bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Naional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerh Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun masksud perumusan renja adalah sebagai upaya untuk memenuhi kriteria penyusunan Rencana Kerja SKPD seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama rencana kerja tahunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.

Sedangkan tujuan dalam perumusan renja Dinas Sosial ini adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang pada tahun 2019.
b. Diperolehnya prioritas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
c. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang di tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2017

Dalam BAB II ini akan dikemukan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial tahun 2017 dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam BAB III ini akan dipaparkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial, program dan kegiatan Dinas Sosial.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan tentang pencatatan akhir yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut untuk seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam mengoperasionalkan subtansi Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2017 terdiri 9 program dan 42 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan Makan dan Minum
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Peringatan Hari Besar Nasional
13. Pameran Pembangunan
14. Pembinaan ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan Mebeleur
17. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
20. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
21. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
24. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
26. Penyusunan Lakip.
27. Penyusunan Laporan Barang dan Iventaris Kantor.
28. Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah.
29. Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya

V. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

30. Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh).
31. Bimbingan dan motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK
32. Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH).
33. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
34. Pembinaan/Monitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan
35. Pembinaan/Monitoring Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
36. Pelaksanaan Launching Penyaluran Bantuan Sosial non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

VII. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

37. Penanganan maslah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
38. Penanganan Orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar

VIII. Program Pembinaan dan Penyandang Cacat dan Trauma

39. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Trauma

IX. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial

40. Pembinaan Penyandang Eks Gangguan Sosial.
41. Penanganan Gangguan JIwa Terlantar.

XII. Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN

42. Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN bagi fakir miskin dan orang terlantar

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mencapai angka sebesar 94,65%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan pada Tahun 2017 tidak mendapatkan masalah ataupun kendala dalam pelaksanaannya, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan yang ada.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, Realisasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk tahun 2017 dapat dilihat pada ***Tabel T-C 29.***

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai kebijakan Bupati.

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi antara lain :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
- Pembinaan UPTD di bidang Sosial;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan Dinas Sosial;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Sosial;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Sosial;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Sosial;
- Penyusunan Analisa Jabatan;
- Penyusunan Sistem Pengendalian Internal;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

   Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi

menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketetalaksanaan itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.

Jika dilihat dalam lingkup nasional, arah kegiatan fungsi ketatalaksanaan negara sebenarnya mengacu kepada kebijaksanaan nasional seperti yang diungkapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) seperti yang atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah menetapkan arah kebijakan bidang penyelengaraan negara antara lain dalam bidang tatalaksana yaitu peningkatan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai suatu organisasi, Dinas Sosial Kabupaten Sintang mutlak memiliki fungsi ketatalaksanaan yang baik, rapi dan jelas, sehingga dengan demikian kinerja Dinas Sosial akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi ketatalaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Sintang, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Dinas Sosial

Kabupaten Sintang. Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Kebijakan di Bidang Sosial serta di UPTD di bawahnya.
- Mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan di bidang Sosial.
- Mengembangkan dan menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) antar bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
- Menyusun dan menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
- Melakukan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dilingkungan Dinas Sosial.
- Meneruskan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Sosial.
- Melaksanakan Penetapan Kinerja di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

2. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin di Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana pembangunan dapat dipilah dalam beberapa kegiatan yaitu proses dan waktu

penyusunan program dan rencana pembangunan, jenis program dan rencana pembangunan yang disusun dan produk perencanaan yang telah dihasilkan. Mengenai 2 (dua) tugas pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan.

   Sebagai suatu fungsi, penyusunan program dan rencana pembangunan mengacu pada proses perencanaan pada umumnya yaitu:

   - Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
   - Mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan.
   - Mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan.
   - Menetapkan alternatif terbaik.
   - Melaksanakan kegiatan.
   - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Jenis program dan rencana pembangunan yang disusun.

   Mengenai jenis program dan rencana pembangunan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

   - Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra)
   - Rencana Kerja Dinas Sosial
   - Program dan rencana pembangunan lainnya

3. Koordinasi dan Konsultasi dibidang Sosial

   Diantara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan

kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka Menengah (Renstra). Dua kegiatan ini sesungguhnya bersifat mendukung guna memperlancar dan meningkatkan Koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan menyatukan aktifitas, informasi dan fungsi Dinas Sosial dengan Unit Kerja terkait baik dalam lingkup kabupaten, propinsi, regional dan pusat guna mendukung proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh informasi/keterangan yang lebih rinci dan baku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial terutama kepada unit kerja pemerintah tingkat atas propinsi dan pusat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan aturan yang baru, maka menuntut kegiatan koordinasi dan konsultasi cukup besar guna memproleh kejelasan berbagai aktivitas yang akan, telah dan seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial, dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

4. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi. Keberadaan tugas monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Sosial, terkait dengan tugas pokok Dinas Sosial. Monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada dasarnya fungsi yang diarahkan untuk memastikan bahwa rencana Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hasil kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang kemudian dihimpun dalam suatu bentuk laporan evaluasi yang substansinya menjadi bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada ***Tabel T-C 29.***

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sintang secara umum melakukan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Jika dicermati pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial seperti diuraikan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar) faktor eksternal (terbatasnya lapangan pekerjaan, kesenjangan dan ketidakadilan) .
2. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan dan upaya dilakukan Dinas Sosial belum dapat terakomodir dengan baik dan hanya mampu mengirim 2 klien di Panti Sosial Bina Netra Wita Guna Bandung, 2 klien di Balai Besar Panti Rehabilitasi Bogor Cibinong, 2 klien di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar.
3. Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti curah hujan yang sangat berlebihan sehingga mengakibatkan banjir di Kabupaten dan Kecamatan yang dilalui aliran sungai.
4. Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalah gunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS belum bisa tertangani dengan

baik dikarenakan belum mempunyai fasilitas Rumah Singgah.

5. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat rumah yang tidak layak huni, sehingga Dinas Sosial berupaya untuk memberika bantuan berupa bahan rumah dan hanya mampu diberikan kepada 50 KK dengan sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2017.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2019 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2018. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya terdapat beberapa usulan dari hasil musrenbang di tingkat kecamatan.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 terdiri dari 12 (dua belas) Program yang dijabarkan dalam 49 (empat puluh sembilan) kegiatan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang sebagian berasal dari masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dimana akan diusulkan untuk dibangunnya KAT (Komunitas Adat Terpencil), yaitu Bantuan Bahan Rumah di Kecamatan Sepauk, Binjai Hulu dan Sintang).

Rehap Makam Pahlawan di Kec. Ketungau Tengah juga merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.2
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Sintang
Tahun 2019

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program:** Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS **Kegiatan :** a.Bantuan Fakir Miskin/Bantuan Bahan Rumah	Kec. Sepauk, Binjai Hulu, Sintang	Tertatanya rumah layak huni yang sehat	10 Rumah	
	b.Rehab Makam Pahlawan	Kec. Ketungau Tengah	Terpeliharannya makam pahlawan	1 paket	

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS SOSIAL SINTANG TAHUN 2019

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan Negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut :

Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : bearti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar induvidu, gender, maupun wilayah.

Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Berdasarkan Prioritas Nasional ke 4 yaitu Penanggulangan kemiskinan memiliki Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sasaran kegiatannya adalah Kegiatan Bimbingan dan Motivasi bagi Pelayanan BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga (BKSK), untuk merealisasikan program dan kegiatan

pemerintah pusat maka disusunlah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Kabupaten Sintang.

Prioritas ke 10 adalah daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik terdapat Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya. Pemberdayaan KAT adalah Proses Pemberian daya, kewenangan dan kepercayaan kepada Komunitas Adat Terpencil setempat untuk menentukan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial

Tujuan Perubahan Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka 4 bulan ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada Misi Kabupaten Sintang (Misi 6) yang telah ditetapkan.

Misi Keenam

- Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Pertama :

- Meningkatkan fungsi pelayanan administrative dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan sosial

  Sasaran :

  - Meningkatnya pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan sosial;
  - Peringatan Hari Pahlawan

Tujuan Kedua :

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial

  Sasaran :

  Meningkatnya perlindungan dan pembinaan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kea rah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat.

Tujuan Ketiga :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial atau partisipasi sosial masyarakat

  Sasaran :

  Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan kelompok-kelompok produktif

Tujuan Keempat :

- Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui pengembangan alternative-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial,penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial

Sasaran :

Meningkatnya mutu pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul tahun 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan dan pendidikan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel.
4. Membangun komitmen serta pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial pada berbagai jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara professional.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pelayanan sosial yang adil, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8) Penyediaan Makanan dan Minuman
9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
11) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
12) Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas
13) Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan
14) Penataan Aset

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15) Pengadaan Mebeleur
16) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
17) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21) Pemeliharaan rutin/berkala perangkat computer dan printer
22) Rehabilitasi sedang/berat gedung

c. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur.*

23) Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

d. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*

24) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

25) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
27) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
28) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
29) Penyusunan Laporan Barang dan Iventaris Kantor
30) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
31) Penyususunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

2. Program Urusan Wajib Dinas Sosial

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

32) Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh)
33) Bimbingan dan motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK
34) Monitoring dan Evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
35) Pendataan Masyarakat Miskin
36) Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

37) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa
38) Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar
39) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
40) Penanganan gangguan jiwa terlantar
41) Fasilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

42) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma
43) Pembinaan penyandang eks gangguan psikotik

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

44) Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik

e. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

45) Bimbingan sosial terhadap waria

f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

46) Penyediaan premi asuransi kesehatan (Jamkesda terintegrasi JKN)
47) Verifikasi dan Validasi data PBI JKN fakir miskin dan orang terlantar
48) Fasilitasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
49) Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)
50) Penyediaan Premi Asuransi Kesehatan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Provinsi Kalbar.
51) Verifikasi dan Validasi Data Program Keluarga Harapan (PKH)

g. Program Peringatan Hari Besar Nasional

52) Peringatan Hari Pahlawan
53) Pameran Pembangunan
54) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan
55) Napak Tilas Apang Semangai

Usulan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 termasuk Perubahan ditampilkan ***pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 dan Daftar Usulan Kegiatan Prioritas 2.***

Dari usulan tersebut maka telah ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019 dan disahkan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 050.13/509/KEP.BAPPEDA 2018 tanggal 16 Juli 2018 Tentang

Pengesahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019, dan Keputusan Bupati Sintang Nomor: / / KEP. BAPPEDA/2019 tanggal 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019.

BAB IV
P E N U T U P

Keberadaan tahun 2019 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang memiliki makna strategis, karena merupakan tahun ketiga perwujudan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Sebagai tahun yang berada di pertengahan perencanaan, tahun 2019 selain menjadi tahap lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya, juga merupakan tahap pemantapan, penguatan serta penajaman terhadap program dan kegiatan prioritas yang telah dilakukan terdahulu. Sudah semestinya kita memberikan perhatian dan komitmen yang lebih terhadap penyelenggaraan Musrenbang tahun 2018 yang akan menghasilkan RKPD tahun 2019.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk satu tahun ke depan yaitu tahun 2019, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 terdapat 6 (enam) Kegiatan Baru yang masing-masing memiliki urgensi yang sangat penting di dalam penyelengaraan pelayanan sosial.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang satu tahun ke depan.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Sintang, September 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL

Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 1993031 010

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. TABEL TC-29
2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
3. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS 2
4. KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : / /KEP.BAPPEDA 2019 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019
5. PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

****

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017
dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sintang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
											Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
1							**Wajib**									
1	13						**Sosial**									
1	13	1	13	03	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
1	13	1	13	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk jasa surat menyurat	100	20,00	20	16,31	81,56	20	56,31	56,31
1	13	1	13	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	100	20,00	20	9,83	49,13	20	49,83	49,83
1	13	1	13	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasinal	100	20,00	20	16,15	80,77	20	56,15	56,15
1	13	1	13	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100	20,00	20	19,41	97,04	20	59,41	59,41
1	13	1	13	03	01	10	Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis Kantor guna pendukung,pelaksanaan AdminitrasiPerkantoran	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100	20,00	20	19,70	98,52	20	59,70	59,70
1	013	1	13	03	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik guna mendukung pelaksnaan adminstrasi perkantoran	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan guna mendukdung pelaksanaan tugas dan pelayanan adminstrasi perkantoran	100	20,00	20	11,47	57,37	20	51,47	51,47
1	13	1	13	03	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman guna mendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang	100	20,00	20	19,99	99,94	20	59,99	59,99
1	13	1	13	03	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	100	20,00	20	14,61	73,07	20	54,61	54,61

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
1	13	1	13	03	01	22	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar	100	20,00	20	18,79	93,96	20	58,79	58,79
1	13	1	13	03	01	28	Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	100	20,00	20	18,96	94,79	20	58,96	58,96
1	13	1	13	03	01	31	Pembinaan ke dalam Daerah	Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan dengan instansi lain	100	20,00	20	19,88	99,39	20	59,88	59,88
1	13	1	13	03	01	47	Penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM) dan Gas	Meningkatnya kelancaran operasonal kantor	100	20,00	20	18,44	92,21	20	58,44	58,44
1	06	1	13	03	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									
1	13	1	13	03	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersediannya Mebeleur untuk kelancaran bekerja	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	02	11	Pengadaan Peralatan danPerlengkapan kantor	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	100	20,00	20	19,46	97,31	20	59,46	59,46
1	13	1	13	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	02	56	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya Peralatan Perangkat Komputer	100	20,00	20	18,56	92,78	20	58,56	58,56
1	13	1	13	03	02	58	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Terpeliharanya perangkat Komputer dan Printer	100	20,00	20	9,75	48,75	20	49,75	49,75
1	13	1	13	03	05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**									
1	13	1	13	03	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	20,00	20	18,03	90,16	20	58,03	58,03
1	13	1	13	03	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**									
							Dan Keuangan									
1	13	1	13	03	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	03	Penyusunan Pelaporan Pronosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan Prognosis	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	06	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan LAKIP	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	12	Penyusunan Laporan Barang dan Iventaris kantor	Tersusunnya laporan barang dan Iventaris kantor	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	13	Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah	Tersusunnya laporan barang /aset kantor	100	20,00	20	20,00	100,00	20	60,00	60,00
1	13	1	13	03	06	25	Pelaksanaan Forum SKPD	Adanya keterpaduan program dan kegiatan antara kecamatan dan kabupaten	100	20,00	20	19,17	95,83	20	59,17	59,17
1	13	1	13	03	15		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainny**									
1	13	1	13	03	15	07	Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh)	Tertatanya rumah layak huni yang sehat	100	20,00	20	19,91	99,54	20	59,91	59,91
1	13	1	13	03	15	09	Bimbingan dan motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK	Terbinanya dan peran aktif TKSK dan PSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial	100	20,00	20	19,45	97,23	20	59,45	59,45

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
1	13	1	13	03	15	13	Pembinaan Program Keluarga harapan (PKH)	Meningkatnya partisipasi peserta PKH	100	20,00	20	19,61	98,03	20	59,61	59,61
1	13	1	13	03	15	14	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah	100	20,00	20	19,24	96,20	20	59,24	59,24
1	13	1	13	03	15	15	Pembinaan /Monitoring Kelompok Usaha Bersama Bagi Keluarga	Meningkatnya perekonomian KUBE	100	20,00	20	19,97	99,83	20	59,97	59,97
1	13	1	13	03	15	16	Pembinaan/ Monitoring Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui usaha ekonomi produktif	100	20,00	20	16,99	84,97	20	56,99	56,99
1	13	1	13	03	16		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**									
1	13	1	13	03	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan keadian luar biasa	terlaksananya pelaksanaan masalah-masalah strategis tanggap cepat darurat dan KLB	100	20,00	20	19,34	96,68	20	59,34	59,34
1	13	1	13	03	16	21	Penanganan Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Lanjut Usia Terlantar	Terjaminnya penanganan orang terlantaar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar	100	20,00	20	18,23	91,17	20	58,23	58,23
1	13	1	13	03	16	22	Pelaksanaan Launching Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat.	Terlaksananya penyaluran bantuan sosial non tunai PKH	100	20,00	20	19,93	99,67	20	59,93	59,93
1	13	1	13	03	18		**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**									
1	13	1	13	03	18	09	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dab Trauma	Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas	100	20,00	20	18,57	92,86	20	58,57	58,57
1	13	1	13	03	26		**Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial**									
1	13	1	13	03	26	01	Pembinaan Penyandang Eks Gangguan Psikotik	Meningkatnya pelayanan pembinaan eks Penyandang eks gangguan psikotik	100	20,00	20	18,46	92,32	20	58,46	58,46
1	13	1	13	03	26	02	Penanganan Gangguan Jiwa Terlantar	Terlaksananya penanganan gangguan jiwa terlantar	100	20,00	20	19,80	99,00	20	59,80	59,80
1	13	1	13	03	27		**Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN Bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar**									
1	13	1	13	03	27	1	Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar	100	20,00	20	19,69	98,46	20	59,69	59,69

Sintang, 2018
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

ALFONSIUS SUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590201 197912 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN : 2019

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**5.024.576.900**				**0**
0106	**Sosial**				**5.024.576.900**				**0**
0106.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**423.441.200**				**0**
0106.010601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Tersedianya Jasa surat menyurat Hasil : Teredianya materai, perangko dan surat yang terkirim untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran		20 % 20 5	1.002.000	Dana Alokasi Umum		20 % 20 5	0
0106.010601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi / Telepon Keluaran : Jumlah pemakaian sumber daya air Keluaran : Jumlah pemakaian jasa listrik Keluaran : Jumlah pemakaian jasa internet Hasil : Tersedianya jasa telepon, air dan listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20 %	33.600.000	Dana Alokasi Umum		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20 %	0
0106.010601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan roda 4 yang memiliki STNK dan ketetapan pajak Keluaran : Kendaraan roda 2 yang memiliki STNK dan ketetapan pajak Hasil : Tersedianya surat-surat kendaraan dinas / operasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran		20 % 20 % 20 %	7.800.000	Dana Alokasi Umum		20 % 20 % 20 %	0
0106.010601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumah ATK yang disediakan Keluaran : Jumlah perlengkapan komputer yang disediakan Hasil : Tersedianya ATK yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran		41 Jenis 4 Jenis 100 %	22.578.600	Dana Alokasi Umum		40 Jenis 4 Jenis 100 %	0
0106.010601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Belanja Cetakan yang disediakan Keluaran : Belanja Penggandaan yang disediakan Keluaran : Belanja Penjilidan yang disediakan Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran		9 Jenis 31200 Lembar 80 Buku 20 %	12.885.000	Dana Alokasi Umum		9 Jenis 31200 Lembar 80 Buku 20 %	0
0106.010601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Alat listrik Hasil : Tersedianya alat listrik untuk penunjang pelayanan administrasi perkantoran		9 Jenis 20 %	7.158.000	Dana Alokasi Umum		9 Jenis 20 %	0
0106.010601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Langganan Surat kabar nasional Hasil : Tersedianya surat kabar		24 Bulan 20 %	3.120.000	Dana Alokasi Umum		24 Bulan 20 %	0
0106.010601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : makanan Keluaran : Snack Hasil : Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor		300 Kotak 300 Kotak 20 %	12.000.000	Dana Alokasi Umum		300 Kotak 300 Kotak 20 %	0

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0106.010601.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementrian		20 % 20 %	89.590.000	Dana Alokasi Umum		20 % 20 %	0
0106.010601.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan ke dalam daerah Hasil : Tercapainya peningkatan kualitas dan keterpaduan program dengan instansi lain		20 Kegiatan 20 %	84.010.000	Dana Alokasi Umum		20 Kegiatan 20 %	0
0106.010601.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	Keluaran : Jumlah tenaga administrasi/teknis Keluaran : Jumlah tenaga sopir Keluaran : Jumlah tenaga kebesihan Hasil : Terbantunya pelayanan administrasi perkantoran dan teknis lainnya serta terciptanya kebersihan kantor		4 Orang 2 Orang 2 Orang 100 %	125.124.000	Dana Alokasi Umum		4 Orang 2 Orang 2 Orang 100 %	0
0106.010601.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	Keluaran : Bahan bakar minyak yang dibutuhkan Hasil : Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk mendukung kelancaran kendaraan dinas		1500 Liter 20 %	16.400.000	Dana Alokasi Umum		1500 Liter 20 %	0
0106.010601.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah alat dan pembersih yang disediakan Hasil : Terciptanya kebersihan kantor sehingga menunjang pelayanan administrasi perkantoran		24 Jenis 100 %	6.173.600	Dana Alokasi Umum		27 Jenis 100 %	0
0106.010601.01.024	Penataan aset	Keluaran : Terlaksanaya penataan aset pemerintah Hasil : Tersedianya laporan penataan aset pemerintah		1 dokumen 100 %	2.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen 100 %	0
0106.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**107.663.000**				**0**
0106.010601.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah mebeleur yang dibutuhkan Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien		5 Jenis 100 %	13.107.000	Dana Alokasi Umum		2 Jenis 100 %	0
0106.010601.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Keluaran : Komputer Keluaran : Printer Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran		4 Unit 4 Unit 20 %	35.956.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit 4 Unit 20 %	0
0106.010601.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : Jumlah Gorden yang dibutuhkan Hasil : Tersedianya Gorden sebagai perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas		0 meter 0 %	15.000.000	Dana Alokasi Umum		30 meter 50 %	0
0106.010601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Pengecatan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor		1 Paket 20 %	10.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Paket 20 %	0
0106.010601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya suku cadang Keluaran : Tersedianya pelumas Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional		4 Unit 4 Unit 20 %	23.600.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit 4 Unit 20 %	0
0106.010601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Mesin rumput dan AC yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur		2 Unit 100 %	5.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Unit 0 %	0

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0106.010601.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Keluaran : Komputer, Notebook dan printer yang terpelihara Hasil : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur		10 Unit 100 %	5.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Unit 0 %	0
0106.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**24.500.000**				**0**
0106.010601.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Pakaian Dinas yang disediakan Hasil : Tersedianya pakaian dinas ASN Dinas Sosial		35 Stel 100 %	24.500.000	Dana Alokasi Umum		0 Stel 0 %	0
0106.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**120.320.000**				**0**
0106.010601.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Diklat yang diikuti ASN Dinas Sosial Hasil : Tercapainya kualitas ASN yang dapat menguasai teknis pekerjaan yang ditangani		7 Kegiatan 100 %	120.320.000	Dana Alokasi Umum		0 Kegiatan 0 %	0
0106.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**13.652.900**				**0**
0106.010601.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil : Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		1 Dokumen 100 %	1.919.000	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0
0106.010601.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Keluaran : Dokumen Prognosis Hasil : Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran 6 bulan berikutnya		1 Dokumen 100 %	1.845.000	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0
0106.010601.06.005	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun		1 Dokumen 100 %	1.884.600	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0
0106.010601.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Keluaran : Dokumen LAKIP Hasil : Tersusunnya Laporan LAKIP		1 Dokumen 100 %	1.960.800	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0
0106.010601.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	Keluaran : Laporan barang dan Inventaris kantor Hasil : Tersusunnya laporan barang dan inventaris kantor		1 Dokumen 1 Dokumen	2.048.500	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Dokumen	0
0106.010601.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Keluaran : Tersedianya Rencana Kerja (Renja) Hasil : Tersusunnya Rencana Kerja (Renja)		1 Dokumen 0 Dokumen	2.010.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Dokumen	0
0106.010601.06.011	Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	Keluaran : tersedianya RKA SKPD Hasil : tersusunnya RKA SKPD		1 Dokumen 1 Dokumen	1.985.000	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 Dokumen	0
0106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**				**500.000.000**				**0**
0106.010601.15.006	Bantuan fakir miskin (Rumah Kumuh)	Keluaran : Rumah kumuh yang dibantu Hasil : Tertatanya rumah layak huni yang sehat		10 Unit 10 Unit	125.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Unit 0 Unit	0
0106.010601.15.007	Bimbingan dan motivasi terhadap pekerja sosial masyarakat (PSM) dan TKSK	Keluaran : Pelatihan bimbingan dan motivasi yang baik Hasil : Tercapainya pelayanan yang berkualitas		1 Kegiatan 95 %	50.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Kegiatan 0 %	0
0106.010601.15.010	Monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Keluaran : Tercapainya monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah		1 Dokumen 100 %	125.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0106.010601.15.012	Pendataan masyarakat miskin	Keluaran : Terlaksananya Verifikasi Data di 14 Kecamatan Kabupaten Sintang Hasil : Terlaksananya Verifikasi Data di 14 Kecamatan Kabupaten Sintang		1 Dokumen 100 %	200.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 0 %	0
0106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**				**230.000.000**				**0**
0106.010601.16.010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa	Keluaran : Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa Hasil : Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa		100 % 5 Kecamatan	60.000.000	Dana Alokasi Umum		0 % 0 Kecamatan	0
0106.010601.16.012	Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar	Keluaran : Terlaksananya penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar Hasil : Terjaminnya penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar		30 Orang 90 %	60.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.010601.16.013	Pelatihan taruna siaga bencana (Tagana)	Keluaran : Jumlah TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang dibina dan dilatih Hasil : Meningkatnya kemampuan TAGANA dalam penanganan masalah tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa		40 Orang 100 %	50.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.010601.16.014	Penanganan gangguan jiwa terlantar	Keluaran : Terlaksananya pembinaan penyandang eks orang dengan gangguan jiwa terlantar Hasil : Meningkatnya kesejahteraan bagi penyandang eks gangguan psikotik		20 Orang 100 %	60.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.18	**Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma**				**145.000.000**				**0**
0106.010601.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Keluaran : Terampil dan terlatihnya penyandang disabilitas Hasil : Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas		6 Orang 100 %	70.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.010601.18.006	Pembinaan penyandang eks gangguan psikotik	Keluaran : Terlaksananya pembinaan penyandang eks gangguan psikotik Hasil : Meningkatnya kesejahteraan bagi penyandang eks gangguan psikotik		12 Orang 100 %	75.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.19	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**				**30.000.000**				**0**
0106.010601.19.005	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan manajemen organisasi sosial / panti asuhan Hasil : Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi sosial / panti asuhan		30 Orang 1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 Kegiatan	0
0106.20	**Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**				**40.000.000**				**0**
0106.010601.20.006	Bimbingan sosial terhadap waria	Keluaran : Terlaksananya bimbingan sosial bagi penyandang waria Hasil : Meningkatnya kesadaran bagi penyandang waria		30 Orang 100 %	40.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 %	0
0106.22	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**3.389.999.800**				**0**
0106.010601.22.001	Penyediaan premi asuransi kesehatan (Jamkesda terintegrasi JKN)	Keluaran : Jumlah Peserta BPJS Penduduk Miskin Hasil : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BPJS Penduduk Miskin		0 Jiwa 0 %	3.099.999.800	Dana Alokasi Umum		11000 Jiwa 100 %	0

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0106.010601.22.002	Verifikasi dan validasi data PBI JKN fakir miskin dan orang terlantar	Keluaran : peserta penduduk miskin yang mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan		14337 Orang	90.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang	0
		Hasil : Meningkatnya pelayanan BPJS penduduk miskin		100 %				0 %	
0106.010601.22.004	Fasilitasi pendamping program keluarga harapan (PKH)	Keluaran : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan kepada peserta PKH		15887 Orang	200.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Orang	0
		Hasil : Meningkatnya partisipasi peserta PKH		15887 Orang				0 Orang	
04	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**				**300.000.000**				**0**
0405	**Pemerintahan Umum**				**300.000.000**				**0**
0405.24	**Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**				**300.000.000**				**0**
0405.010601.24.005	Peringatan Hari Pahlawan	Keluaran : Peringatan hari Pahlawan		1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Kegiatan	0
		Hasil : Terlaksananya peringatan hari pahlawan		100 %				0 %	
0405.010601.24.018	Pameran pembangunan	Keluaran : Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan		1 Kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Kali	0
		Hasil : Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan		100 %				0 %	
0405.010601.24.019	Fasilitasi sarana dan prasarana makam pahlawan	Keluaran : Pembangunan sarana dan prasarana makam pahlawan		1 Kegiatan	75.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Kegiatan	0
		Hasil : Terlaksananya pembangunan pagar makam pahlawan Kusumalaya kec. Ketungau Tengah		100 %				0 %	
0405.010601.24.024	Napak tilas apang semangai	Keluaran : Terlaksananya kegiatan Napak Tilas		1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum		0 Kegiatan	0
		Hasil : Terlaksananya peringatan hari besar Nasional yaitu Napak Tilas Apang Semangai		100 %				0 %	

Sintang, ...

Plt. Kepala Dinas Sosial

Ir. ARBUDIN, M.SI
NIP. 196504281993031010

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS 2

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	UP	B/L	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)	
				Output		Outcome	Usulan	Disetujui
I	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**							
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	P2	B	Jumlah gedung/gudang yang dipelihara	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor/gudang untuk menunjang kelancaran tugas aparatur	200.000.000,00	
II	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**							
1	Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar	P2	B	Jumlah penyandang disabilias terlantar yang mendapat penanganan	10 orang (dalam 1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar	402.900.000,00	
2	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	P2	B	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat penanganan	20 orang (dalam 1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	764.000.000,00	
3	Penanganan Anak Terlantar	P2	B	Jumlah anak terlantar yang mendapat penanganan	10 orang (dalam 1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar	402.900.000,00	
4	Penanganan Korban Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial	P2	B	Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan	350 orang	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	332.400.000,00	
5	Fasilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	P2	B	Jumlah Penyandang ODGJ yang difasilitasi	46 orang (dalam 1 th)	Terpenuhinya biaya perawatan ODGJ di RSJ Singkawang	250.000.000,00	
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							
1	Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Pemadanan Data Bantuan Sosial (Bansos) PKH, KIS RASTRA dan LANSIA	P2	B	Jumlah verval BDT dan Data Bansos yang dilaksanakan	14 Kecamatan	Terlaksananya verval BDT dan Data Bansos yang dapat menunjang program perlindungan dan jaminan sosial	780.095.000,00	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**							
1	Pembinaan Karang Taruna	P2	B	Jumlah karang taruna yang mendapat pembinaan	100 orang	Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta perpengetahuan	100.000.000,00	

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	UP	B/L	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)	
				Output		Outcome	Usulan	Disetujui
2	Pembinaan Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM)	P2	B	Jumlah karang taruna yang mendapat pembinaan	100 orang	Terbentuknya Pekerja Sosial Masyarakat yang terampil	100.000.000,00	
3	Sosialisasi tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber dan Bantuan Sosial (Uang dan Barang)	P2	B	Jumlah peserta yang mendapat sosialisati	100 orang	Meningkatnya pemahaman tentang Undang-undang Pengumpulan Uang dan Barang	100.000.000,00	
4	Pembinaan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3)	P2	B	Jumlah peserta yang mendapat pembinaan	30 orang	Terciptanya pelayanan publik yang prima	100.000.000,00	
5	Pembinaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	P2	L	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	14 orang	Terciptanya pelayanan publik yang prima	100.000.000,00	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA**							
1	Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT)	P2	B	Jumlah penerima pemberdayaan sosial KAT	42 KK	Terlaksananya pemberdayaan sosial KAT	48.144.200,00	
2	Monitoring dan evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	P2	L	Jumlah KUBE yang menjadi target monev	15 Kelompok	Terlaksananya monev KUBE	31.862.000,00	
VI	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH**							
1	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	P2	B	Jumlah peserta Peringatan HKSN yang dilaksanakan	100 orang	Teciptanya Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial	200.000.000,00	
						Total	**3.912.301.200,00**	

Sintang, Februari 2018

Plh. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

H. HADI RAYANI, S.TP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701109 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Tahun Anggaran 2019

RENJA-SKPD

Urusan Pemerintahan	:	0106	Sosial
Organisasi	:	010601	Dinas Sosial
Sub Unit	:		

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang) (Rp.)	%
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	**BELANJA DAERAH**				3.124.719.727,00				3.164.719.727,00	40.000.000,00	101,28
5 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				3.124.719.727,00				3.164.719.727,00	40.000.000,00	101,28
5 1 1	**BELANJA PEGAWAI**				3.124.719.727,00				3.164.719.727,00	40.000.000,00	101,28
5 1 1 01	**Gaji dan tunjangan**				2.119.695.727,00				2.208.422.159,00	88.726.432,00	104,19
5 1 1 01 01	Gaji pokok PNS/uang representasi				1.524.217.119,00				1.555.877.069,00	31.659.950,00	102,08
	- Gaji Pokok PNS Golongan IV 5 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	10,00	OB	5.000.000,00	50.000.000,00	10,00	OB	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
	- Gaji Pokok PNS Golongan IV 5 org x 12 bln	60,00	OB	5.000.000,00	300.000.000,00	60,00	OB	5.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
	- Gaji Pokok PNS Golongan III 13 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	26,00	OB	4.000.000,00	104.000.000,00	26,00	OB	4.000.000,00	104.000.000,00	0,00	100,00
	- Gaji Pokok PNS Golongan III 13 org x 12 bln	156,00	OB	4.000.000,00	624.000.000,00	156,00	OB	4.000.000,00	624.000.000,00	0,00	100,00
	- Gaji Pokok PNS Golongan II 8 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	16,00	OB	3.500.000,00	56.000.000,00	16,00	OB	3.500.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00
	- Gaji Pokok PNS Golongan II 8 org x 12 bln	96,00	OB	3.500.000,00	336.000.000,00	96,00	OB	3.500.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00
	- Cadangan	1,00	Thn	85.877.069,00	85.877.069,00	1,00	Thn	85.877.069,00	85.877.069,00	0,00	100,00
5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga				210.945.000,00				210.945.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Istri Golongan IV - 5 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	10,00	OB	500.000,00	5.000.000,00	10,00	OB	500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Istri Golongan IV - 5 org x 12 bln	60,00	OB	500.000,00	30.000.000,00	60,00	OB	500.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Istri Golongan III - 13 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	26,00	OB	400.000,00	10.400.000,00	26,00	OB	400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Istri Golongan III - 13 org x 12 bln	156,00	OB	400.000,00	62.400.000,00	156,00	OB	400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Istri Golongan II - 8 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	16,00	OB	350.000,00	5.600.000,00	16,00	OB	350.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang) (Rp.)	%
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Tunjangan Istri Golongan II - 8 org x 12 bln	96,00	OB	350.000,00	33.600.000,00	96,00	OB	350.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan IV - 10 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	20,00	OB	100.000,00	2.000.000,00	20,00	OB	100.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan IV - 10 org x 12 bln	120,00	OB	100.000,00	12.000.000,00	120,00	OB	100.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan III - 26 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	52,00	OB	80.000,00	4.160.000,00	52,00	OB	80.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan III - 26 org x 12 bln	312,00	OB	80.000,00	24.960.000,00	312,00	OB	80.000,00	24.960.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan II - 16 org x 2 bln (THR & Gaji 13)	32,00	OB	70.000,00	2.240.000,00	32,00	OB	70.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Anak Golongan II - 16 org x 12 bln	192,00	OB	70.000,00	13.440.000,00	192,00	OB	70.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00
	- Cadangan	1,00	Thn	5.145.000,00	5.145.000,00	1,00	Thn	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	100,00
5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan				133.910.000,00				155.907.100,00	21.997.100,00	116,43
	- Eselon IIb - 1 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	2,00	OB	2.025.000,00	4.050.000,00	2,00	OB	2.025.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IIb - 1 org x 12 bln	12,00	OB	2.025.000,00	24.300.000,00	12,00	OB	2.025.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IIIa - 1 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	2,00	OB	7.258.550,00	14.517.100,00	2,00	OB	7.258.550,00	14.517.100,00	0,00	100,00
	- Eselon IIIa - 1 org x 12 bln	12,00	OB	1.260.000,00	15.120.000,00	12,00	OB	1.260.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IIIb - 2 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	4,00	OB	980.000,00	3.920.000,00	4,00	OB	980.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IIIb - 2 org x 12 bln	24,00	OB	980.000,00	23.520.000,00	24,00	OB	980.000,00	23.520.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IVa - 8 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	16,00	OB	540.000,00	8.640.000,00	16,00	OB	540.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00
	- Eselon IVa - 8 org x 12 bln	96,00	OB	540.000,00	51.840.000,00	96,00	OB	540.000,00	51.840.000,00	0,00	100,00
	- Eselon	0,00	-	0,00	0,00	20,00	OB	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum				35.700.000,00				60.767.232,00	25.067.232,00	170,22
	- Golongan III - 6 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	12,00	OB	185.000,00	2.220.000,00	12,00	OB	185.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00
	- Golongan III - 6 org x 12 bln	72,00	OB	185.000,00	13.320.000,00	72,00	OB	185.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00
	- Golongan II - 8 org x 2 bln (THR & Gaji ke 13)	16,00	OB	496.702,00	7.947.232,00	16,00	OB	496.702,00	7.947.232,00	0,00	100,00
	- Golongan II - 8 org x 12 bln	96,00	OB	180.000,00	17.280.000,00	96,00	OB	180.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00
	- Golongan	0,00	-	0,00	0,00	100,00	OB	200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5 1 1 01 06	Tunjangan beras				108.079.608,00				108.079.608,00	0,00	100,00
	- Tunjangan Beras (104 orang x 14 bulan)	1.456,00	OB	72.420,00	105.443.520,00	1.456,00	OB	72.420,00	105.443.520,00	0,00	100,00
	- Cadangan	1,00	Thn	2.636.088,00	2.636.088,00	1,00	Thn	2.636.088,00	2.636.088,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang) (Rp.)	%
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus				28.700.000,00				28.700.000,00	0,00	100,00
	- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14,00	Bln	2.000.000,00	28.000.000,00	14,00	Bln	2.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
	- Cadangan	1,00	Thn	700.000,00	700.000,00	1,00	Thn	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
5 1 1 01 08	Pembulatan gaji				144.000,00				146.150,00	2.150,00	101,49
	- Pembulatan Gaji	14,00	OB	10.000,00	140.000,00	14,00	OB	10.000,00	140.000,00	0,00	100,00
	- Cadangan	1,00	Thn	6.150,00	6.150,00	1,00	Thn	6.150,00	6.150,00	0,00	100,00
5 1 1 01 09	Jaminan Kesehatan				60.000.000,00				60.000.000,00	0,00	100,00
	- Jaminan Kesehatan	1,00	Thn	60.000.000,00	60.000.000,00	1,00	Thn	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5 1 1 01 22	Jaminan Kematian				10.000.000,00				15.000.000,00	5.000.000,00	150,00
	- Jaminan Kematian	1,00	Thn	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	Thn	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5 1 1 01 23	Jaminan Keselamatan Kerja				8.000.000,00				13.000.000,00	5.000.000,00	162,50
	- Jaminan Keselamatan Kerja	1,00	Thn	13.000.000,00	13.000.000,00	1,00	Thn	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
5 1 1 02	**Tambahan penghasilan PNS**				1.005.024.000,00				956.297.568,00	(48.726.432,00)	95,15
5 1 1 02 01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja				1.005.024.000,00				956.297.568,00	(48.726.432,00)	95,15
	- Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok III - 1 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	2,00	OB	3.670.000,00	7.340.000,00	2,00	OB	3.670.000,00	7.340.000,00	0,00	100,00
	- Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok III - 1 org x 12 bln	12,00	OB	3.670.000,00	44.040.000,00	12,00	OB	3.670.000,00	44.040.000,00	0,00	100,00
	- Administrator Kelompok II - 1 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	2,00	OB	2.990.000,00	5.980.000,00	2,00	OB	2.990.000,00	5.980.000,00	0,00	100,00
	- Administrator Kelompok II - 1 org x 12 bln	12,00	OB	2.990.000,00	35.880.000,00	12,00	OB	2.990.000,00	35.880.000,00	0,00	100,00
	- Administrator Kelompok V - 2 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	4,00	OB	2.560.000,00	10.240.000,00	4,00	OB	2.560.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00
	- Administrator Kelompok V - 2 org x 12 bln	24,00	OB	2.560.000,00	61.440.000,00	24,00	OB	2.560.000,00	61.440.000,00	0,00	100,00
	- Pengawas Kelompok II - 8 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	16,00	OB	2.070.000,00	33.120.000,00	16,00	OB	2.070.000,00	33.120.000,00	0,00	100,00
	- Pengawas Kelompok II - 8 org x 12 bln	96,00	OB	1.562.433,00	149.993.568,00	96,00	OB	1.562.433,00	149.993.568,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Teknis Kelompok II - 8 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	16,00	OB	1.420.000,00	22.720.000,00	16,00	OB	1.420.000,00	22.720.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Teknis Kelompok II - 8 org x 12 bln	96,00	OB	1.420.000,00	136.320.000,00	96,00	OB	1.420.000,00	136.320.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Teknis Kelompok III - 8 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	16,00	OB	1.370.000,00	21.920.000,00	16,00	OB	1.370.000,00	21.920.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang) (Rp.)	%
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Pelaksana Teknis Kelompok III - 8 org x 12 bln	96,00	OB	1.370.000,00	131.520.000,00	96,00	OB	1.370.000,00	131.520.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Operasional Kelompok I - 7 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	14,00	OB	1.310.000,00	18.340.000,00	14,00	OB	1.310.000,00	18.340.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Operasional Kelompok I - 7 org x 12 bln	84,00	OB	1.310.000,00	110.040.000,00	84,00	OB	1.310.000,00	110.040.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Administrasi Kelompok I - 5 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	10,00	OB	925.000,00	9.250.000,00	10,00	OB	925.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Administrasi Kelompok I - 5 org x 12 bln	60,00	OB	925.000,00	55.500.000,00	60,00	OB	925.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Administrasi Kelompok II - 1 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	2,00	OB	855.000,00	1.710.000,00	2,00	OB	855.000,00	1.710.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Administrasi Kelompok II - 1 org x 12 bln	12,00	OB	855.000,00	10.260.000,00	12,00	OB	855.000,00	10.260.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Pelayanan Kelompok II - 1 org x 2 bln (THR & TP ke 13)	2,00	OB	606.000,00	1.212.000,00	2,00	OB	606.000,00	1.212.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Pelayanan Kelompok II - 1 org x 12 bln	12,00	OB	606.000,00	7.272.000,00	12,00	OB	606.000,00	7.272.000,00	0,00	100,00
	- Pelaksana Teknis Kelompok III - 5 org x 12 bln	60,00	OB	1.370.000,00	82.200.000,00	60,00	OB	1.370.000,00	82.200.000,00	0,00	100,00
	Jumlah				3.124.719.727,00				3.164.719.727,00	40.000.000,00	101,28

Sintang, 23 Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial

Ir. ARBUDIN, M.SI
NIP. 196504281993031010